

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Antar Personal/Interpersonal

2.1.1 Pengertian Komunikasi Antar Personal/Interpersonal

Kata komunikasi yang dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari bahasa Latin yaitu *communis* yang memiliki arti “sama”, *communico*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama”. Komunikasi memberikan saran bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan agar dianut secara bersama (Nofrion, 2018). Pada konteks komunikasi antarmanusia, disebutkan bahwa komunikasi merupakan suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang dalam mengatur lingkungannya dengan menciptakan hubungan antar manusia, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain dan berusaha merubah sikap untuk menguatkan sikap serta tingkah laku itu.

Komunikasi interpersonal diartikan sebagai sebuah alur pesan yang terkirim dan diterima oleh dua orang atau kelompok kecil dengan adanya efek serta umpan balik saat itu juga (Soyomukti, 2021:142). Komunikasi interpersonal ialah komunikasi yang terjadi antara pribadi dengan pribadi lainnya, dalam jenis ini setiap pihak (pribadi) dapat berperan sebagai komunikator maupun komunikan.

Joseph A.Devito dalam (Liliweri, 2017: 26) mendefinisikan komunikasi antarpersonal sebagai berikut:

- a. Suatu proses sebuah pesan yang dikirim dan diterima yang terjadi di antara dua orang atau kumpulan kecil seseorang, yang disertai suatu efek dan umpan balik langsung.
- b. Komunikasi sebagai penghubung (*connected*) antara komunikator dengan komunikan, yang mana menjadikan komunikasi antarpersonal tersebut berjalan. Hal ini karena interaksi seseorang mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara tertentu.
- c. Komunikasi yang melibatkan interaksi secara lisan maupun tanpa lisan atau kata-kata (gerak tubuh, ekspresi wajah, dan sebagainya) diantara dua hingga kelompok orang yang saling bergantung atau *independent individuals*. *Independent individuals* ialah komunikasi antarpersonal yang berlangsung antara orang-orang yang saling terkait di mana di antara mereka saling mempengaruhi. Seperti hubungan anak dengan bapak,

pertemanan dua orang yang erat, dan komunikasi antara pasangan yang sedang bercinta.

Adapun beberapa ciri-ciri komunikasi antarpribadi adalah:

- a. Masing-masing pihak memiliki kedekatan
- b. Masing-masing pihak mengirim dan menerima pesan secara spontan
- c. Pesan yang disampaikan bisa berbentuk verbal ataupun nonverbal
- d. Bahasa yang digunakan bisa berbentuk formal ataupun nonformal
- e. Isi pesan merupakan hal yang bersifat pribadi
- f. Komunikasi bersifat dialogis (Purba et al., 2020: 32)

Komunikasi ini menjadi lebih efektif bila berjalan dengan dialogis, yaitu di antara dua orang yang satu sama lain menyampaikan serta menerima pesan. Adanya kemungkinan timbul pengertian secara bersama (*mutual understanding*) lebih tinggi dikarenakan kedua orang tersebut berdekatan, dapat melihat ekspresi wajah, tatapan wajah, serta gesture tubuh. Kedekatan tersebut juga akan menciptakan rasa empati dan rasa menghormati satu sama lain, karena tiap individu ialah manusia yang tampak di depan mata (Soyomukti, 2012: 143).

2.1.2 Karakteristik Komunikasi Interpersonal Menurut Joseph A. DeVito

Menurut DeVito (2016), komunikasi interpersonal yang efektif memiliki lima karakteristik utama, yaitu:

- a. Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan merupakan kesediaan individu untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan secara jujur kepada orang lain. Dalam komunikasi interpersonal, keterbukaan membantu membangun kepercayaan sehingga komunikasi dapat berlangsung secara efektif.

Dalam konteks penelitian ini, keterbukaan terlihat dari kemampuan pendamping menciptakan suasana yang aman sehingga korban bersedia menceritakan pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya.

- b. Empati (Empathy)

Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan dan pengalaman orang lain dari sudut pandang mereka. Empati memungkinkan individu memberikan respons yang sesuai terhadap kondisi emosional lawan bicara.

Pada proses pendampingan korban pelecehan seksual, empati menjadi penting karena korban membutuhkan pemahaman dan dukungan emosional selama proses pemulihan berlangsung.

c. Sikap Mendukung (Supportiveness)

Sikap mendukung merupakan kemampuan untuk menciptakan suasana komunikasi yang tidak menghakimi dan memberikan rasa aman kepada lawan bicara.

Dalam penelitian ini, sikap mendukung ditunjukkan melalui berbagai bentuk pendampingan yang diberikan pihak SAPDA kepada korban, baik dalam aspek psikologis, kesehatan, maupun hukum.

d. Sikap Positif (Positiveness)

Sikap positif merupakan kecenderungan untuk memberikan penghargaan, motivasi, dan dorongan kepada orang lain selama proses komunikasi berlangsung.

Sikap positif ini dapat membantu korban membangun kembali kepercayaan diri serta memperkuat motivasi dalam menjalani proses pemulihan setelah mengalami pelecehan seksual.

e. Kesetaraan (Equality)

Kesetaraan adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak dan martabat yang sama dalam proses komunikasi.

Dalam penelitian ini, kesetaraan tercermin dari cara SAPDA memperlakukan perempuan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki hak untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan kasus yang dialaminya.

2.1.3 Tujuan Komunikasi Antar Personal/Interpersonal

Griffin, Allan, Robbins, Spitzberg dalam (Dyatmika, 2021) merumuskan bahwa tujuan dari komunikasi antarpersonal terbagi menjadi empat yaitu:

1. Komunikator atau pemberi pesan pada komunikasi antarpersonal ingin dipahami oleh komunikan atau penerima pesan. Komunikator berharap pesan yang disampaikan didengarkan dan diperhatikan oleh komunikan.
2. Pada komunikasi antarpersonal, seorang komunikator atau pengirim pesan harus memahami keadaan komunikan atau penerima pesannya. Keadaan disini merujuk pada keadaan psikologisnya, kebudayaannya, dan juga lingkungannya.
3. Komunikator pada komunikasi antarpersonal ingin diterima oleh komunikan baik dalam konteks pesan ataupun perilakunya.
4. Komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan) saling memahami satu sama lain serta bekerjasama dalam menyelesaikan suatu hal.

Dalam praktiknya, komunikasi interpersonal bertujuan untuk menyampaikan informasi, menjalin kerjasama, berbagi pengalaman, membentuk hubungan pribadi, memberi motivasi, mengenal diri sendiri dan memahami orang lain, mengungkapkan isi hati, mengubah sikap dan perilaku, dan lainnya (Purba et al., 2020).

2.2 Strategi Komunikasi

2.2.1 Pengertian Strategi Komunikasi

Dalam ruang lingkup komunikasi, strategi digunakan dalam usaha memperoleh tujuan-tujuan dari komunikasi sehingga dapat menciptakan keefektifan penyampaian pesan. pada dasarnya, strategi menjadi suatu alat bagi seseorang pengirim pesan ketika menyampaikan pesan-pesannya kepada penerima pesan, sehingga terciptanya komunikasi yang efektif sampai tujuan dari komunikasi tersebut tercapai dengan sempurna. Hakikat atau dasar dari strategi adalah perencanaan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai (Effendy, 2018). Dengan demikian strategi komunikasi adalah arahan atau rancangan dalam mencapai tujuan melalui manajemen komunikasi.

Seperti yang diketahui sebelumnya jika komunikasi memiliki peran penting pada kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menciptakan hubungan antara komunikator dengan

komunikasikan. Tentunya ada beragam konteks dan bidang komunikasi tersebut berjalan dengan melalui proses yang lengkap. Ketika salah satu komponen tidak lengkap atau tidak ada, maka akan berdampak pada keberlangsungan komunikasi. Banyaknya komponen dan aspek inilah yang membuat komunikator harus merancang atau menyusun sebuah strategi komunikasi agar tujuan dari komunikasi tersebut tercapai.

Strategi komunikasi sendiri dapat menemukan atau memecahkan beberapa masalah dengan cara menyiapkan strategi atau rangkaian cara untuk memecahkan beberapa kasus tertentu dan juga menyediakan solusi untuk penanganannya.

2.2.2 Perumusan Strategi Komunikasi

Menurut Cangara (2013:61), strategi komunikasi mencakup empat hal yaitu menentukan komunikator yang tepat, menyusun pesan yang menarik dan persuasif, mengidentifikasi komunikasi atau audiens sasaran, menentukan media komunikasi yang efektif.

A. Penetapan komunikator (menentukan komunikator yang tepat)

Komunikator selaku orang utama pada proses komunikasi yang berperan krusial. Oleh karena itu, komunikator harus memenuhi tiga syarat yaitu tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas), daya tarik (attractive), dan kekuatan (power).

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh seorang komunikator di mata audiens. Kredibilitas berkaitan dengan sejauh mana komunikasi mempercayai informasi yang disampaikan oleh komunikator. Seorang komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi biasanya dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keahlian yang relevan dengan pesan yang disampaikan. Selain itu, sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan audiens terhadap komunikator.

Dalam konteks komunikasi sosial maupun advokasi, kredibilitas komunikator menjadi faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi penerimaan pesan oleh masyarakat. Apabila komunikator dianggap memiliki integritas serta kompetensi yang baik, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipercaya oleh audiens. Sebaliknya, apabila komunikator dianggap tidak memiliki kredibilitas, maka pesan yang disampaikan cenderung kurang mendapatkan perhatian dari komunikasi.

2. Daya Tarik

Daya tarik merupakan kemampuan komunikator dalam menarik perhatian serta simpati dari audiens. Daya tarik tidak hanya berkaitan dengan penampilan fisik semata, tetapi juga meliputi cara berkomunikasi, sikap, bahasa tubuh, serta kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dengan komunikan. Komunikator yang memiliki daya tarik biasanya mampu menciptakan suasana komunikasi yang lebih nyaman sehingga audiens merasa lebih terbuka dalam menerima pesan yang disampaikan.

Berbagai penelitian komunikasi menunjukkan bahwa audiens cenderung lebih mudah menerima pesan dari komunikator yang mereka sukai atau yang memiliki kesamaan dengan mereka. Oleh karena itu, daya tarik komunikator dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Contoh daya tarik dalam komunikasi dapat terlihat dari kemampuan komunikator dalam berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, sikap yang ramah, ekspresi wajah yang bersahabat, serta kemampuan untuk menunjukkan empati kepada audiens.

3. Kekuatan

Kekuatan atau power dalam komunikasi merujuk pada kemampuan komunikator untuk mempengaruhi atau mengarahkan perilaku komunikan. Kekuatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti posisi sosial, jabatan, keahlian, maupun pengalaman yang dimiliki oleh komunikator. Individu yang memiliki posisi atau otoritas tertentu sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses komunikasi karena audiens cenderung menghormati dan mengikuti arahan yang diberikan.

Dalam konteks komunikasi organisasi atau advokasi sosial, kekuatan komunikator tidak selalu berkaitan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dapat berupa kekuatan non-fisik seperti kemampuan intelektual, kemampuan mengendalikan emosi, serta kemampuan mempengaruhi opini publik. Komunikator yang memiliki kekuatan tersebut dapat menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan komunikan agar memahami pesan yang disampaikan serta mendorong terjadinya perubahan sikap maupun perilaku.

Dengan demikian, penetapan komunikator yang tepat menjadi salah satu langkah penting dalam strategi komunikasi. Komunikator yang memiliki kredibilitas, daya tarik, serta kekuatan yang baik akan lebih mampu menyampaikan pesan secara efektif sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai dengan optimal.

B. Menyusun pesan

Jika dilihat dari bentuknya, simbol yang digunakan untuk membentuk sebuah pesan terbagi menjadi dua yaitu simbol verbal yang dalam penggunaannya memakai bahasa, serta simbol nonverbal yang penggunaannya memakai bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Dalam konteks ini, penyampaian pesan dapat dikategorikan berdasarkan sifat dari pesan tersebut, yaitu:

1. Pesan yang Bersifat Informatif

Pada komunikasi yang terjadi diantara manusia, arti informasi dalam pengertian sehari-hari adalah suatu wawasan yang didapat oleh seseorang. Pesan yang informatif ini akan mempengaruhi unsur kognitif atau pengetahuan dari target yang ditentukan.

2. Pesan yang Bersifat Mendidik

Pesan yang bersifat mendidik ini tidak hanya mempunyai kecenderungan perubahan dalam aspek yang tidak mengetahui menjadi mengetahui, namun juga dapat mengerjakan apa yang sebelumnya tidak dipahami menjadi dipahami.

3. Pesan yang Bersifat Persuasif

Komunikasi persuasif dilakukan dengan tujuan merubah wawasan, sikap, dan perilaku seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yakni merangkai pesan yang penuh dengan dorongan dimana pesan disusun untuk memberikan efek internal psikologis kepada seseorang yang dituju sehingga mereka mengikuti isi pesan yang disampaikan.

C. Penetapan Target Sasaran atau Audiens

Penetapan target audiens dalam komunikasi ini penting dilakukan karena pengelompokan yang telah dilakukan akan mempengaruhi bagaimana pesan yang akan dibuat, disalurkan, dan diterima oleh target sasaran tersebut dengan melakukan segmentasi sebagai berikut:

1. Aspek sosiodemografik, melingkupi jumlah usia, gender, tingkat pendidikan, dan lainnya
2. aspek profil psikologis, melingkupi cerminan dari kondisi kejiwaan target sasaran seperti temperamen, sabar, tenang, dan lainnya
3. Aspek karakteristik perilaku, melingkupi kebiasaan target sasaran seperti suka menabung, suka menolong, santun, dan lainnya.

D. Pemilihan media dan saluran komunikasi

Dalam menentukan media komunikasi perlu untuk memperhitungkan sifat atau karakteristik dari isi dan tujuan pesan yang akan dikirimkan. Bentuk-bentuk dari media disini beragam, mulai dari media lawas (media cetak, media elektronik, dan lainnya) serta media terbaru (internet). Sedangkan saluran juga terbagi menjadi beberapa macam seperti saluran komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi tradisional, dan saluran komunikasi antarpribadi (Cangara, 2013: 108-120).

Dalam menyusun strategi komunikasi, dibutuhkan pemikiran yang mempertimbangkan faktor yang mendukung serta faktor yang menghambat. Effendy (Uchjana Effendy, 2018) merumuskan faktor pendukung dan penghambat itu seperti berikut:

A. Mengenali Sasaran Komunikasi

Sebelum melakukan kegiatan komunikasi, pelaku komunikasi perlu mengetahui serta mengenali individu yang ingin disasar (target sasaran komunikasi), di mana hal ini dipengaruhi oleh tujuan dari komunikasi tersebut. Oleh karena itu, penting memperhatikan faktor-faktor pada diri komunikan sebagai berikut:

1. Faktor kerangka referensi (*frame of reference*)

Pesan yang nantinya dikirim untuk penerima, pesan dicocokkan dengan kerangka referensi yang terbentuk dari pendidikan, pengalaman, norma hidup, gaya hidup, status sosial, cita-cita, ideologi, dan lainnya.

2. Faktor situasi dan kondisi

Situasi mengacu pada kondisi komunikasi saat penerima pesan telah mendapat pesan yang disampaikan. Kondisi yang berpotensi mengganggu proses komunikasi bisa diketahui sebelumnya, juga bisa muncul secara mendadak ketika komunikasi berlangsung. Kemudian kondisi ini ialah *state of personality* dalam diri penerima pesan, atau keadaan fisik dan psikis penerima pesan ketika mendapatkan pesan yang dikirim.

B. Pemilihan Media Komunikasi

Agar pesan tersampaikan pada sasaran komunikasi, maka perlu adanya pemilihan media ataupun kombinasi kumpulan media yang beriringan dengan tujuan yang ingin didapat, pesan atau informasi yang hendak dikirimkan, dan teknik penggunaannya.

Pemilihan media yang paling baik sukar untuk ditegaskan karena setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

C. Pengkajian Tujuan Pesan Komunikasi

Setiap pesan mempunyai tujuan tertentu, hal inilah yang mempengaruhi cara atau teknik mana yang sebaiknya digunakan, apakah sebaiknya menggunakan teknik informasi, atau teknik persuasi, atau teknik instruksi. Disini, komunikator mesti paham dengan pesan komunikasi tersebut. Pesan komunikasi terbentuk berdasarkan dua hal meliputi isi pesan (*the content of the message*) serta lambang (*symbol*). Isi pesan yang disampaikan dapat sama, namun dalam menggunakan simbol dapat beragam. Lambang yang senantiasa dipakai dalam menyampaikan pesan komunikasi diantaranya seperti bahasa, warna, gambar, gestur tubuh, dan lainnya.

D. Peranan Komunikator Dalam Komunikasi

Beberapa faktor terpenting dari seorang komunikator ketika ia melakukan komunikasi yaitu sebagai berikut:

1. Daya tarik sumber

Daya tarik merupakan salah satu kemampuan komunikator dalam memberikan informasi, daya tarik tidak hanya berasal dari penampilan ataupun paras wajah namun, daya tarik juga dapat dilihat dari segi cara berkomunikasi komunikator, sikap, bahasa, serta kemampuan dalam membangun hubungan yang baik dalam berkomunikasi dengan audiens. Komunikator dapat dikatakan sukses dalam menyampaikan pesannya jika dapat merubah sikap, opini, serta tingkah laku komunikan dari mekanisme daya tarik jika penerima pesan merasa bahwa pengirim pesan selalu ikut serta dengan dirinya. Singkatnya, komunikan merasakan terdapat persamaan antara komunikator dengan dirinya.

2. Kredibilitas sumber

Kredibilitas merupakan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh seorang komunikator dalam penyampaian informasi dimata audiens. Faktor ini yang dapat mewujudkan komunikasi mencapai keberhasilan ialah rasa yakin atau rasa percaya komunikan terhadap komunikator. Rasa percaya di sini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri komunikator seperti profesi atau keahlian.

2.2.3 Tujuan Strategi Komunikasi

Setelah merumuskan strategi komunikasi, maka diperlukan tujuan dari strategi komunikasi itu sendiri. Menurut Wayne Pace, Brent D, dan M. dalam (Asriwati, 2022) merumuskan terdapat tiga tujuan sentral dalam strategi komunikasi yaitu:

1. *to secure understanding*
2. *to establish acceptance*
3. *to motivate action*

Tujuan strategi komunikasi yang dimaksud merupakan pemastian bahwa penerima pesan (komunikan) paham tentang pesan yang didupatkannya (*to secure understanding*). Setelah komunikan paham dengan pesan yang diterimanya, selanjutnya penerimaannya tersebut harus dibina (*to establish acceptance*). Lalu yang terakhir adalah untuk memotivasi aksi atau kegiatan (*to motivate action*). Selain itu, tujuan strategi komunikasi menurut Liliweri (Liliweri A, 2011: 248-249) terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Memberitahu (*announcing*)
2. Memotivasi (*motivating*)
3. Mendidik (*educating*)
4. Menyebarkan Informasi (*informing*)
5. Mendukung Pembuatan Keputusan (*supporting decision making*)

Tujuan utama strategi komunikasi adalah untuk memberitahu, yakni mengenai kapasitas serta kualitas informasi (*announcing*). Kemudian untuk memberikan motivasi dalam konteks agar audiens merespon terhadap pesan yang diterimanya (*motivating*) dengan pemberian motivasi berharap audiens dapat mengutarakan respon dari berbagai pesan yang audiens terima. Yang ketiga yaitu untuk mengedukasi, dimana pesan yang disebarkan mengandung unsur yang dapat mengedukasi audiens (*educating*), dengan pesan yang dapat mengedukasi berharap para audiens dapat mempelajari pesan-pesan tersebut agar tidak mengalami gagal paham atau mendapatkan kesalahpahaman. Setelah itu, strategi komunikasi bertujuan untuk memperluas informasi kepada masyarakat atau audience yang disasar (*informing*). Dan terakhir yaitu untuk mendukung pembuatan keputusan, disini pesan harus disusun dan dirancang sedemikian rupa agar audiens atau komunikan yang menerima pesan tersebut yakin atau bahkan sampai melakukan sesuatu terhadap pesan tersebut (*supporting decision making*).

2.3 Pelecehan Seksual

2.3.1 Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang banyak terjadi di berbagai lingkungan sosial, baik di ruang publik maupun privat. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan emosional korban. Secara umum, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai segala bentuk perilaku yang bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, baik melalui tindakan fisik, verbal, maupun nonverbal yang mengarah pada pelecehan terhadap martabat dan integritas seseorang.

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang menyerang tubuh, fungsi reproduksi, serta hak seksual seseorang secara paksa. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling berat adalah pemerkosaan. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dengan menggunakan penis yang dimasukkan ke dalam vagina, anus, ataupun mulut korban. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan jari atau benda lain yang dimasukkan ke bagian tubuh korban tanpa persetujuan. Tindakan ini umumnya dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman, tekanan psikologis, maupun memanfaatkan kondisi korban yang tidak berdaya (Komnas Perempuan, 2021).

Secara hukum di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pemerkosaan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Bab XIV Pasal 285 disebutkan bahwa pemerkosaan merupakan tindakan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun. Ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa negara mengakui pemerkosaan sebagai tindakan kriminal yang serius karena melanggar hak asasi manusia serta merendahkan martabat korban.

Namun demikian, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dapat muncul dalam berbagai tindakan lain seperti sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau ucapan yang bernuansa seksual, pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, hingga pelecehan seksual melalui media digital. Tindakan-tindakan tersebut

sering kali dilakukan dengan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan, kondisi kerentanan korban, atau hubungan sosial tertentu yang membuat korban sulit untuk menolak atau melaporkan kejadian tersebut.

Dalam perspektif psikologi, tindakan pelecehan seksual juga dapat dipahami melalui teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan naluriah yang salah satunya adalah libido. Libido merupakan energi psikis yang berkaitan dengan dorongan seksual yang menjadi bagian dari insting kehidupan manusia. Menurut Boeree (2016), libido berfungsi sebagai kekuatan motivasional yang mendorong individu untuk mencari kepuasan dan mempertahankan kehidupan. Namun demikian, dalam konteks sosial, dorongan tersebut seharusnya dikendalikan oleh norma, nilai moral, serta aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila dorongan tersebut tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat memunculkan perilaku menyimpang, termasuk tindakan pelecehan seksual. Dalam hal ini, individu yang tidak mampu mengontrol dorongan seksualnya dapat melakukan tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum, sehingga merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat mengenai batasan perilaku seksual yang sehat serta menghormati hak dan integritas tubuh orang lain.

Dalam konteks penelitian ini, pelecehan seksual juga perlu dipahami dari perspektif kerentanan kelompok tertentu, khususnya perempuan penyandang disabilitas. Kelompok ini sering kali menghadapi risiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses informasi, ketergantungan pada orang lain, serta adanya stigma sosial yang masih melekat terhadap penyandang disabilitas. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual karena korban dianggap tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau melaporkan kejadian yang dialaminya.

Selain itu, perempuan penyandang disabilitas juga kerap mengalami hambatan dalam proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan akses komunikasi, kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas, serta minimnya pemahaman aparat maupun masyarakat mengenai kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penanganan kasus pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas memerlukan pendekatan yang lebih sensitif dan inklusif.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta merusak martabat dan integritas korban. Pelecehan seksual tidak hanya mencakup tindakan pemerkosaan, tetapi juga berbagai bentuk perilaku seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dalam konteks perempuan penyandang disabilitas, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena adanya faktor kerentanan yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan, pendampingan, serta strategi komunikasi yang efektif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendamping seperti SAPDA Yogyakarta, untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban.

2.3.2 Faktor Terjadinya Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu pelaku maupun dari lingkungan sosial di sekitarnya. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya disebabkan oleh dorongan seksual semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, moral, sosial, serta kondisi situasional yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut. Menurut Collier (1992), terdapat lima faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual, yaitu faktor biologis, faktor psikologis, faktor moral, faktor sosiokultural, dan faktor situasional. Kelima faktor ini saling berhubungan dan dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindakan pelecehan seksual.

a. Faktor Biologis

Faktor biologis berkaitan dengan dorongan seksual alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Dorongan seksual tersebut merupakan bagian dari insting reproduksi yang secara alamiah ada dalam diri manusia. Dalam perspektif biologis, laki-laki sering dipandang memiliki kecenderungan lebih aktif dalam mengekspresikan dorongan seksual dibandingkan perempuan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan hormonal serta fungsi reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, dorongan biologis tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Dalam kehidupan sosial, dorongan seksual harus dikendalikan oleh norma sosial, nilai moral, serta aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Individu yang mampu mengontrol dorongan biologisnya akan menyalurkan kebutuhan seksualnya melalui cara-cara yang

sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Sebaliknya, individu yang tidak mampu mengendalikan dorongan tersebut dapat melakukan tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum, termasuk pelecehan seksual.

Selain itu, faktor biologis juga sering dikaitkan dengan tingkat agresivitas seseorang dalam mengekspresikan dorongan seksualnya. Individu yang memiliki kecenderungan agresif serta tidak memiliki kemampuan pengendalian diri yang baik lebih berpotensi melakukan tindakan pelecehan seksual. Oleh karena itu, meskipun faktor biologis merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, pengendalian diri serta kesadaran moral tetap menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual.

b. Faktor Psikologis

Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi kepribadian serta keadaan mental seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam kehidupan sosial. Individu yang memiliki gangguan kontrol diri, sifat agresif, serta rendahnya empati terhadap orang lain memiliki potensi lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, pelaku pelecehan seksual tidak hanya didorong oleh keinginan seksual semata, tetapi juga oleh keinginan untuk menunjukkan kekuasaan atau dominasi terhadap korban. Kondisi psikologis seseorang juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu serta pola asuh yang diterima dalam keluarga. Individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan atau kurang mendapatkan pendidikan mengenai nilai moral dan penghormatan terhadap orang lain cenderung memiliki perilaku yang lebih agresif dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

Selain itu, rendahnya kemampuan individu dalam mengendalikan emosi juga dapat menjadi faktor yang memicu terjadinya pelecehan seksual. Individu yang tidak mampu mengelola emosi dengan baik sering kali bertindak secara impulsif tanpa mempertimbangkan dampak dari tindakannya terhadap orang lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan tindakan pelecehan seksual.

c. Faktor Moral

Faktor moral berkaitan dengan nilai-nilai etika serta norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan sosial. Moral berfungsi sebagai landasan bagi individu dalam menentukan perilaku yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat. Individu yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi akan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukannya terhadap orang lain. Sebaliknya, individu yang memiliki moralitas rendah cenderung tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap perilakunya. Dalam konteks pelecehan seksual, rendahnya kesadaran moral dapat membuat seseorang tidak mepedulikan hak serta martabat orang lain. Pelaku pelecehan seksual sering kali lebih mengutamakan kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial yang dialami oleh korban. Rendahnya moralitas ini dapat dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan karakter, lemahnya penanaman nilai-nilai etika dalam keluarga, serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sosial.

Selain itu, lemahnya penegakan norma sosial dalam masyarakat juga dapat memperkuat terjadinya tindakan pelecehan seksual. Ketika masyarakat tidak memberikan sanksi sosial yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual, maka pelaku dapat merasa bahwa tindakannya tidak akan menimbulkan konsekuensi yang serius. Oleh karena itu, penguatan nilai moral dalam keluarga, pendidikan, serta masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual.

d. Faktor Sosiokultural

Faktor sosiokultural berkaitan dengan nilai-nilai budaya, norma sosial, serta struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya, masih terdapat sistem patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Sistem patriarki ini sering kali menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual. Selain itu, stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi tersebut. Banyak korban yang merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena khawatir akan disalahkan oleh masyarakat. Budaya menyalahkan korban atau victim blaming sering kali membuat korban memilih untuk diam daripada melaporkan kejadian yang dialaminya.

Faktor sosiokultural juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender serta hak-hak perempuan. Ketika masyarakat masih

memandang perempuan sebagai pihak yang lebih lemah atau berada pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka potensi terjadinya kekerasan seksual menjadi lebih besar. Oleh karena itu, perubahan nilai sosial serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya pelecehan seksual.

e. Faktor Situasional

Faktor situasional berkaitan dengan kondisi atau situasi tertentu yang memungkinkan terjadinya tindakan pelecehan seksual. Situasi yang minim pengawasan, lingkungan yang tidak aman, serta kondisi korban yang berada dalam posisi rentan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual. Misalnya, lingkungan kerja, institusi pendidikan, transportasi umum, atau ruang publik yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan situasi tertentu untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap korban. Misalnya ketika korban berada dalam keadaan sendirian, berada di tempat yang sepi, atau berada dalam situasi yang membuatnya sulit untuk meminta bantuan. Kondisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku karena peluang untuk diketahui orang lain menjadi lebih kecil.

Faktor situasional juga dapat berkaitan dengan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Individu yang memiliki posisi kekuasaan lebih tinggi, seperti atasan di tempat kerja, guru di lingkungan pendidikan, atau pihak yang memiliki otoritas tertentu, sering kali memanfaatkan posisi tersebut untuk melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap individu yang berada dalam posisi lebih lemah. Dalam konteks perempuan penyandang disabilitas, faktor situasional menjadi semakin kompleks karena kelompok ini sering kali berada dalam kondisi yang lebih rentan. Keterbatasan dalam mobilitas, komunikasi, serta ketergantungan terhadap orang lain dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan yang lebih komprehensif dengan menciptakan lingkungan yang aman serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor biologis, psikologis, moral, sosiokultural, serta situasional dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan

pelecehan seksual apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, upaya pencegahan pelecehan seksual tidak hanya berfokus pada individu pelaku, tetapi juga perlu dilakukan melalui perubahan nilai sosial, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan penyandang disabilitas.

2.4 Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris ; *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan kementerian kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat, Riyadi (2012:293). Penyandang disabilitas juga sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam diantaranya penyandang disabilitas yang memiliki kekurangan fisik, mental maupun gabungan dari keduanya. Berdasarkan definisi yang ditetapkan oleh *World Health Organization*, disabilitas merupakan kondisi yang menyebabkan gangguan pada hubungan seseorang dengan lingkungannya. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas terbesar di dunia, 80% dari jumlah penyandang disabilitas di dunia berada di negara-negara berkembang (Koesno, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang-orang yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk bersosialisasi dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kelainan fisik dan mental, yang dapat mengganggu untuk melakukan kesehariannya dengan selayaknya.

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama

sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan, kesempatan, serta akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum.

Dalam kajian akademik, klasifikasi jenis disabilitas menjadi penting untuk memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu penyandang disabilitas. Pemahaman ini juga berperan dalam menentukan strategi komunikasi dan pendekatan pendampingan yang tepat, terutama dalam penanganan kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas. Organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam isu disabilitas, seperti SAPDA Yogyakarta, menggunakan pemahaman mengenai jenis disabilitas untuk menyesuaikan metode komunikasi, advokasi, serta pendampingan korban sesuai dengan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

1. Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan kondisi keterbatasan yang berkaitan dengan gangguan fungsi gerak tubuh seseorang akibat kelainan pada tulang, otot, atau sistem saraf. Individu dengan disabilitas fisik biasanya mengalami hambatan dalam mobilitas maupun aktivitas fisik sehari-hari. Bentuk disabilitas fisik dapat berupa amputasi anggota tubuh, kelumpuhan, cerebral palsy, maupun gangguan pada sistem motorik lainnya. Menurut World Health Organization, disabilitas fisik seringkali membutuhkan dukungan berupa alat bantu mobilitas seperti kursi roda, tongkat, atau alat prostetik untuk meningkatkan kemandirian individu dalam beraktivitas (World Health Organization, 2011).

Selain hambatan fisik yang bersifat biologis, penyandang disabilitas fisik juga menghadapi hambatan struktural berupa kurangnya aksesibilitas fasilitas publik, transportasi, serta lingkungan sosial yang belum sepenuhnya inklusif. Kondisi tersebut dapat memperbesar kerentanan penyandang disabilitas terhadap berbagai bentuk diskriminasi, termasuk kekerasan berbasis gender. Dalam konteks penelitian ini, perempuan dengan disabilitas fisik yang menjadi korban pelecehan seksual seringkali mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian yang dialami karena keterbatasan mobilitas serta minimnya akses terhadap layanan pendampingan.

2. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan kondisi yang ditandai dengan keterbatasan dalam fungsi intelektual serta kemampuan adaptif yang memengaruhi kemampuan individu dalam memahami informasi, belajar, dan memecahkan masalah. Individu dengan disabilitas intelektual umumnya memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata serta mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi adaptif seperti komunikasi, interaksi sosial, dan keterampilan hidup sehari-hari (Schalock et al., 2010).

Beberapa contoh kondisi yang termasuk dalam kategori disabilitas intelektual antara lain sindrom Down, keterlambatan perkembangan kognitif, serta gangguan perkembangan lainnya yang memengaruhi kemampuan berpikir individu. Dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan seksual, perempuan dengan disabilitas intelektual seringkali menjadi kelompok yang sangat rentan karena keterbatasan dalam memahami situasi yang berbahaya maupun dalam menyampaikan pengalaman kekerasan yang dialami.

Oleh karena itu, lembaga pendamping seperti SAPDA Yogyakarta biasanya menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih sederhana, visual, serta dilakukan secara bertahap untuk membantu korban dengan disabilitas intelektual dalam mengungkapkan pengalaman yang dialami selama proses pendampingan.

3. Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan kondisi yang berkaitan dengan gangguan pada fungsi indera, seperti penglihatan dan pendengaran. Individu dengan disabilitas sensorik mengalami hambatan dalam menerima maupun menyampaikan informasi melalui indera tertentu. Jenis disabilitas sensorik yang umum dikenal antara lain tunanetra (gangguan penglihatan), tunarungu (gangguan pendengaran), serta tunawicara (gangguan kemampuan berbicara).

Penyandang tunanetra biasanya menggunakan sistem huruf Braille atau teknologi pembaca layar untuk mengakses informasi, sedangkan penyandang tunarungu menggunakan bahasa isyarat sebagai sarana komunikasi utama. Menurut Oliver (2013), hambatan komunikasi yang dialami penyandang disabilitas sensorik seringkali menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan publik.

Dalam konteks penanganan kasus pelecehan seksual, hambatan komunikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi proses pendampingan korban. Misalnya, korban dengan disabilitas rungu memerlukan penerjemah bahasa isyarat agar dapat menyampaikan kronologi kejadian secara jelas. Oleh karena itu, organisasi advokasi disabilitas seperti SAPDA Yogyakarta biasanya menyediakan pendamping yang memahami bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif untuk memastikan korban dapat menyampaikan pengalaman secara aman dan nyaman.

4. Disabilitas Mental

Disabilitas mental berkaitan dengan gangguan pada kondisi psikologis atau kejiwaan yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Individu dengan disabilitas mental dapat mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, membangun hubungan sosial, serta menjalankan aktivitas sehari-hari secara stabil. Beberapa bentuk disabilitas mental yang umum dikenal antara lain depresi berat, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan kecemasan kronis.

Menurut World Health Organization, gangguan kesehatan mental dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup seseorang apabila tidak ditangani dengan pendekatan medis dan psikososial yang tepat (World Health Organization, 2013). Dalam konteks perlindungan terhadap kekerasan seksual, perempuan dengan disabilitas mental sering menghadapi stigma sosial yang menyebabkan pengalaman kekerasan yang mereka alami tidak selalu dipercaya oleh lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, proses pendampingan korban dengan disabilitas mental membutuhkan pendekatan yang lebih sensitif dan berfokus pada pemulihan psikologis korban.

5. Disabilitas Ganda

Disabilitas ganda merupakan kondisi ketika seseorang mengalami lebih dari satu jenis disabilitas secara bersamaan, misalnya kombinasi antara disabilitas fisik dan sensorik atau antara disabilitas intelektual dan mental. Kondisi ini biasanya memerlukan pendekatan layanan yang lebih kompleks karena kebutuhan yang dimiliki individu menjadi lebih beragam.

Penyandang disabilitas ganda seringkali membutuhkan layanan rehabilitasi terpadu yang melibatkan berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, serta pendampingan sosial. Dalam konteks penelitian mengenai strategi komunikasi penanganan pelecehan seksual, pemahaman mengenai disabilitas ganda menjadi penting karena setiap jenis keterbatasan memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda dalam proses pendampingan korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi jenis disabilitas memiliki peran penting dalam memahami kebutuhan serta kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Pemahaman ini menjadi dasar bagi lembaga advokasi seperti SAPDA Yogyakarta dalam merancang strategi komunikasi, pendampingan korban, serta advokasi kebijakan untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis

1. M.A Trisuci Paskalia, (2019) yang berjudul **“Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan oleh kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

peneliti mengetahui dampak apa saja yang terjadi ketika seorang penyandang disabilitas mengalami pelecehan seksual.

2. Indah Amalia 2015 dengan judul penelitian **“Pendampingan Anak Korban Kekerasan Fisik di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Yogyakarta”**. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendampingan anak korban kekerasan fisik di LPA Yogyakarta ialah menangani permasalahan anak dari empat aspek meliputi aspek Hukum (pendampingan korban di dalam menjalani persidangan di pengadilan) aspek psikologis (memulihkan kejiwaan anak), aspek medis (pendampingan di rumah sakit apabila korban terluka secara medis) dan aspek sosial (penyadaran masyarakat lingkungan tempat korban supaya korban bisa diterima di masyarakat lagi). Selain itu LPA Yogyakarta juga menerapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuannya seperti: *Assessment, Planning, Intervensi dan Terminasi*. Selama di dalam pendampingan LPA menemui hambatan yaitu ketika pihak korban melapor ke pihak kepolisian banyak yang dicabut kembali karena masyarakat masih takut berurusan dengan pengadilan. Ada stigma yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang menjadi saksi terkena pidana hukum dan takut jika aib mereka menyebar luas. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Amalia pada tahun 2015 penelitian tersebut memiliki persamaan dengan yang peneliti lakukan yaitu tentang pendampingan anak korban kekerasan. Perbedaannya terletak pada fokus yang diambil oleh masing-masing peneliti, yakni peneliti sebelumnya mengambil fokus pada korban kekerasan fisik sedangkan peneliti mengambil fokus pada korban kekerasan seksual.

3. Rizky, F. (2021) dalam penelitiannya berjudul **“Strategi Komunikasi LBH APIK dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Jakarta”**. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang efektif mencakup edukasi masyarakat, pelibatan media massa, dan penggunaan testimoni korban untuk meningkatkan empati publik. Penelitian ini berfokus dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, dengan adanya strategi komunikasi yang efektif membuat masyarakat menjadi aware dalam tingkat kekerasan seksual yang terjadi dan menjadikan masyarakat lebih berani dalam mengutarakan perasaannya melalui media massa yang menjadi salah satu alat untuk edukasi umum.

4. Rahmawati, A. (2020) dalam penelitian **“Komunikasi Inklusif dalam Advokasi Difabel di Yogyakarta”**. Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi yang efektif dengan penyandang disabilitas memerlukan media alternatif seperti bahasa isyarat, video edukatif, dan penggunaan narasi empatik.

5. Tiara Apriyani (2021) dalam penelitiannya berjudul **“Strategi komunikasi yang digunakan SAPDA Yogyakarta dalam mendampingi perempuan difabel korban kekerasan”**. Temuan utama penelitian ini adalah dengan mempelajari kondisi korban yang mengalami pelecehan seksual dengan bekerja sama bersama keluarga untuk membangun konsen konseling dan berbagai kegiatan edukatif sebagai strategi preventif.

6. Andrie Irawan (2023) dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas intelektual merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan kemampuan serta stigma masyarakat yang menganggap mereka tidak cakap secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih komprehensif sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga proses peradilan dengan memperhatikan aksesibilitas serta kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

7. Melani Netilita Ingutali, dkk. (2023) dengan judul penelitian **“Faktor Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Penyandang Disabilitas dan Upaya Penanggulangannya”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas serta upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak penyandang disabilitas, adanya ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, serta kurangnya perlindungan sosial terhadap kelompok disabilitas. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran lembaga sosial dalam memberikan edukasi, advokasi, serta pendampingan terhadap korban.